

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemikiran Praktik Kerja Lapangan

Dalam era globalisasi dan perkembangan dunia kerja yang semakin pesat, dunia pendidikan dituntut untuk mampu menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara teoritis, tetapi juga kompeten dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, perguruan tinggi vokasi seperti Politeknik Negeri Bengkalis memandang penting untuk membekali mahasiswanya dengan pengalaman kerja langsung melalui program Praktik Kerja Lapangan di dunia industri maupun instansi pemerintahan. Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III maupun Diploma IV di Politeknik Negeri Bengkalis.

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan perguruan tinggi vokasi negeri yang didirikan pada tahun 2000 dan secara resmi beralih status menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2011. Politeknik Negeri Bengkalis berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan vokasi unggulan yang menghasilkan lulusan profesional, kompeten, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu program studi yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis adalah D-IV Akuntansi Keuangan Publik yang berada di bawah naungan Jurusan Administrasi Niaga. Program studi ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi yang berfokus pada sektor publik, termasuk akuntansi pemerintahan, perpajakan, pengelolaan keuangan negara dan daerah, serta audit sektor publik. Lulusan dari program studi ini diharapkan mampu menjadi tenaga profesional yang dapat berkontribusi dalam pengelolaan keuangan negara secara akuntabel dan transparan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dari pembayaran masyarakat yang bersifat memaksa guna untuk keperluan negara. Menurut Mardiasmo (2016), Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada

negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Iuran ini bersifat wajib dan dapat dipaksakan tanpa diiringi dengan balas jasa khusus. Pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak terkadang dapat mengalami hambatan. Salah satu hambatan dalam pembayaran pajak adalah kurangnya pengetahuan mengenai pajak. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak hingga tidak adanya pembayaran pajak. Keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak dapat memengaruhi negara karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut menuntut terselenggaranya administrasi perpajakan yang akurat, tertib, dan terdokumentasi dengan baik. Seiring meningkatnya jumlah Wajib Pajak, kompleksitas transaksi ekonomi, serta kebutuhan akan pelayanan perpajakan yang lebih efektif, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus efektivitas pengawasan.

Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax Administration System/Coretax*) yang mulai diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai platform digital terintegrasi dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Coretax dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan yang sebelumnya dijalankan melalui aplikasi yang berbeda, seperti e-Faktur, e-Bupot, e-Filing, dan berbagai layanan administrasi lainnya ke dalam satu sistem yang terpusat. Melalui sistem ini, proses administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih sederhana, efisien, transparan, dan mampu menghasilkan data perpajakan yang lebih akurat secara real-time sehingga mendukung proses pengawasan berbasis data (*data-driven tax administration*).

CV Mitra Solution Taxindo Pekanbaru merupakan salah satu Kantor Konsultan Pajak yang telah menerapkan penggunaan sistem Coretax dalam melaksanakan berbagai aktivitas administrasi perpajakan klien. Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, penulis memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan administrasi perpajakan, mulai dari penginputan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25, rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penyusunan serta penginputan Bukti

Pemotongan/Pemungutan (Bupot), hingga proses penyusunan administrasi perpajakan tahunan melalui penginputan laporan keuangan, aktiva, pasiva, serta elemen-elemen perpajakan lainnya ke dalam sistem Coretax. Kegiatan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana implementasi sistem baru memengaruhi proses administrasi perpajakan di lingkungan kantor konsultan pajak.

Meskipun dirancang untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, implementasi Coretax masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Selama pelaksanaan PKL, ditemukan beberapa kendala operasional seperti proses validasi data yang memerlukan ketelitian tinggi, penyesuaian format data sesuai ketentuan sistem, sinkronisasi antara laporan keuangan komersial dengan kebutuhan pelaporan fiskal, serta proses penginputan data yang harus dilakukan secara tepat agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi dalam sistem. Kesalahan sekecil apa pun pada proses administrasi, seperti kesalahan penginputan data atau keterlambatan pelaporan, dapat memengaruhi kelancaran proses administrasi perpajakan klien dan memerlukan proses koreksi yang cukup kompleks. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola administrasi perpajakan melalui sistem Coretax menjadi kompetensi yang sangat penting bagi konsultan pajak maupun calon akuntan di era digital.

Sebagai mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik, pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan menjadi sarana untuk mengintegrasikan pengetahuan akademik yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik profesional di dunia kerja. Keterlibatan secara langsung dalam proses administrasi perpajakan berbasis Coretax memberikan pengalaman yang tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis di bidang perpajakan, tetapi juga memperluas pemahaman mengenai penerapan transformasi digital dalam administrasi perpajakan di Indonesia.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai dasar penyusunan SPT Tahunan di CV Mitra Solution Taxindo Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui proses merekapitulasi dan memverifikasi data Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan Microsoft Excel sebelum dilakukan penginputan ke dalam aplikasi Coretax.
3. Untuk mengetahui tata cara penyusunan dan penginputan data SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui aplikasi Coretax sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Untuk mengetahui proses pemeriksaan akhir dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui aplikasi Coretax hingga diterbitkannya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
5. Untuk mengetahui prosedur pengarsipan dokumen perpajakan secara fisik maupun digital sebagai bagian dari administrasi perpajakan di CV Mitra Solution Taxindo Pekanbaru.
6. Untuk mengetahui penerapan administrasi perpajakan dalam proses penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui aplikasi Coretax pada CV Mitra Solution Taxindo Pekanbaru.

1.2.2 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1. Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Konsultan Pajak CV Mitra Solution Taxindo Pekanbaru memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, antara lain:

- a. Pengembangan Keterampilan Praktis (Hard Skills): Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori akuntansi dan perpajakan yang diperoleh di bangku perkuliahan secara langsung ke dalam kasus riil, khususnya dalam hal penyusunan pembukuan laporan keuangan perusahaan klien.
- b. Penguasaan Teknologi Perpajakan Modern: Mahasiswa berkesempatan terlibat langsung dalam operasional sistem administrasi terbaru milik Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Coretax, mencakup proses input PPh Pasal

- 21, 23, 25, rekapitulasi PPN, serta penginputan Bukti Potong (Bupot).
- c. Kesiapan Kerja (Soft Skills): Melatih mentalitas kerja profesional, ketelitian, kemampuan komunikasi dengan tim konsultan, serta pola pikir analisis dalam menghadapi dinamika dunia kerja di bidang konsultan pajak.
2. Manfaat Penulisan Topik Praktik Kerja Lapangan
- Penulisan laporan mengenai implementasi sistem Coretax dalam pengelolaan kepatuhan pajak ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak:
- a. Bagi Mahasiswa (Penulis): Menjadi media untuk menuangkan hasil pengamatan secara ilmiah, terstruktur, dan mendalam mengenai transisi digitalisasi perpajakan, serta sebagai bukti kompetensi kelulusan di bidang Akuntansi Perpajakan.
 - b. Bagi Institusi (Politeknik Negeri Bengkalis): Dapat menjadi tambahan referensi akademis, studi literatur, serta materi pelengkap pustaka yang mutakhir bagi mahasiswa jurusan Akuntansi lainnya mengenai penerapan riil sistem Coretax di dunia industri.
 - c. Bagi Instansi (CV Mitra Solution Taxindo): Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi atau dokumentasi internal mengenai alur kerja penginputan, kendala-kendala teknis yang sering muncul pada sistem baru, serta solusi mitigasi risiko yang dapat diterapkan demi mengoptimalkan pelayanan kepada klien.

1.3 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

1.3.1 Jadwal Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 (lima) bulan, terhitung mulai dari tanggal 03 Februari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026, dengan lima hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jum'at.

Adapun jadwal kerja di CV Mitra Solution Taxindo yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Praktik Kerja Lapangan

No	Hari	Jam Kerja	Istirahat	Keterangan
1	Senin	08.00 s/d 17.00 WIB	12.00 s/d 13.30 WIB	Masuk Kerja
2	Selasa	08.00 s/d 17.00 WIB	12.00 s/d 13.30 WIB	Masuk Kerja
3	Rabu	08.00 s/d 17.00 WIB	12.00 s/d 13.30 WIB	Masuk Kerja
4	Kamis	08.00 s/d 17.00 WIB	12.00 s/d 13.30 WIB	Masuk Kerja
5	Jumat	08.00 s/d 17.00 WIB	12.00 s/d 13.30 WIB	Masuk Kerja
6	Sabtu	Libur		
7	Minggu	Libur		

Sumber: Data Olahan, 2026

1.3.2 Time Schedule Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, dimulai pada 3 Februari 2026 sampai dengan bulan 30 Juni 2026 di CV Mitra Solution Taxindo Pekanbaru. Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa diwajibkan mengajukan permohonan tempat magang kepada instansi yang dituju serta memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis.

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan ketentuan kerja yang berlaku di perusahaan. Adapun rincian time schedule pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Time Schedule Praktik Kerja Lapangan

No	Keterangan	Bulan							
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Pengajuan Tempat PKL								

2	Sosialisasi dan Pembekalan PKL								
3	Persiapan PKL								
4	Pelaksanaan PKL								
5	Pembuatan Laporan PKL								
6	Seminar PKL								

Sumber: Data olah, 2026

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan secara luring (on-site) pada Kantor Konsultan Pajak yang beralamat lengkap sebagai berikut:

Nama Instansi : CV Mitra Solution Taxindo

Alamat : Jl. Pemuda No. 90A - 90B, Kel. Tirta Siak, Kec. Payung Sekaki,

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Kode Pos : 2829



Gambar 1.1 CV MITRA SOLUTION TAXINDO PEKANBARU

Sumber : CV MITRA SOLUTION TAXINDO PEKANBARU